

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan Detik.com



Gambar 4. 1 Logo Detik.com
(Sumber: Detik.com, 2023)

• Detik.com merupakan media digital Indonesia yang bertujuan menyajikan informasi dan gaya hidup terkini. Didirikan pada tanggal 29 Mei 1998, Detik.com dibangun dengan ide awal untuk selalu memberikan informasi terkini. Detik.com kemudian diakuisisi oleh *Transmedia*, perusahaan milik *CT Corp Group* pada 3 Agustus 2011. Detik.com terus berinovasi dan bertransformasi melampaui sektor media. PT. Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom) yang dahulu bernama perusahaan Detik.com kini menjadi PT. Trans Digital Media. Perubahan nama perusahaan tersebut membuat detikcom bukan satu-satunya media digital yang dimiliki oleh PT. Trans Digital Media namun telah berkembang menjadi grup jaringan media bernama *Detik Network*. Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Detik.com ialah sebagai berikut:

1. Visi
Media massa yang memberitakan informasi dengan cepat dan terpercaya, juga mampu memberikan layanan yang terintegrasi.
2. Misi
Memberitakan informasi terpercaya dengan cepat dan akurat, selalu berpijak pada independensi dan keberimbangan. Menyampaikan dengan cara yang lugas, memikat dan informatif dengan varian konten yang

lengkap; Selalu berinovasi dan membangun produk dengan teknologi terdepan yang terukur.

4.1.2 Profil Perusahaan CNNIndonesia.com



Gambar 4. 4 Logo CNNIndonesia.com
(Sumber: CNNIndonesia.com, 2023)

CNN Indonesia lahir dari kerja sama antara investor asing, *Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc* dan salah satu anak perusahaan *CT Corp* milik Chairul Tanjung. Kedua perusahaan mengumumkan kemitraan strategis untuk meluncurkan CNN Indonesia, sebuah portal berita dan saluran televisi *online* di Indonesia. CNN Indonesia merupakan bagian dari Transmedia Group yang lebih besar, di bawah payung PT. Agranet Multicitra Siberkom sebagai bagian dari PT. Trans Media Corpora. Namun sejak tahun 2017, CNNIndonesia.com telah mengganti nama PT dari PT Agranet Multicitra Siberkom menjadi PT Trans Digital Media (Detik.com, 2019).

CNN Indonesia resmi diluncurkan di Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014, mulai muncul melalui portal berita *online* CNNIndonesia.com, disusul dengan kehadiran CNN Indonesia TV pada tanggal 17 Agustus 2015. CNNIndonesia.com hadir dengan slogan "*The News We Can Trust*". Makna dari slogan ini adalah memberikan kepada pembaca informasi faktual berdasarkan fakta, membahas fakta secara tajam dan bermakna, disertai argumentasi yang mudah dipahami dan didukung oleh data yang ada dan konteks yang relevan (*Company Profile* CNNIndonesia.com, 2016).

Idealisme CNNIndonesia.com adalah menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam menyajikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, CNNIndonesia.com berupaya untuk mematuhi standar editorial CNN International dalam produksi beritanya (CNNIndonesia.com *Company Profile*, 2016). Seiring berkembangnya teknologi, CNNIndonesia.com membantu pembaca mengakses segala berita dengan lebih mudah dan gratis melalui situs dan aplikasi resmi. Aplikasi ini dapat diunduh dengan mudah melalui *Google Play*, *Apple Store*, dan *Windows Store* (2016). Dengan akses berita dari perangkat seluler, aplikasi, bahkan komputer desktop, data profil bisnis CNNIndonesia.com mencatat jumlah pembaca berita CNNIndonesia.com mencapai 2,2 juta/bulan hingga Juli 2015 (CNNIndonesia.com *Company Profile*, 2016).

4.2 Hasil dan Analisis Penelitian

4.2.1 Analisis *Framing* Berita Detik.com

A. Analisis Artikel Berita 1 Detik.com

Judul : Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Jokowi: Kita Diintip Ketidakpastian

Sumber : Detik.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Hal ini disahkan olehnya lantaran adanya ketidakpastian ekonomi global yang menjadikan beberapa negara sebagai ‘pasien’ Dana Moneter Internasional (IMF). Atas dasar ini, maka Jokowi tidak ingin Indonesia menjadi salah satu dari negara tersebut, demi menunjang ekonomi Indonesia. Dikatakan bahwa dengan disahkannya Perppu ini maka akan memberikan kepastian hukum pada investor di Indonesia.

Tabel 4. 1 Analisis Artikel Berita 1 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Jokowi: Kita Diintip Ketidakpastian
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan soal alasan di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

		(Ciptaker) pada Jumat 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan tertanggal 30 Desember 2022.
	Latar Informasi	Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa adanya ketidakpastian global sebagai landasam terbitnya Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.
	Kutipan Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kenapa Perppu? Kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali menyampaikan beberapa negara sudah jadi pasien IMF, sudah 14, yang 28 antri di depan pintunya IMF juga jadi pasien." 2. "Ini sebetulnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja, ancaman risiko ketidakpastian itu menyebabkan kita keluarkan perppu karena itu untuk berikan kepastian hukum, kekosongan hukum, dalam persepsi para investor baik dalam dan luar. Itu paling penting." 3. "Ekonomi 2023 kita ini akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor. Udah cukup," <p>Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,"
	Pernyataan Opini Penutup	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang mengatakan: "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,".
Struktur Skrip	What	Ancaman risiko ketidakpastian yang menghantui Indonesia.
	Where	Istana Negara.
	When	30 Desember 2022.
	Who	Presiden Jokowi, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
	Why	Kondisi global yang sedang tidak baik dan Indonesia terancam atas risiko ketidakpastian ekonomi.
	How	Jokowi menandatangani Perppu Cipta Kerja yang kemudian diundangkan guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Pada artikel ini menjelaskan terkait alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja pada paragraf 1-8 oleh Jokowi, dan pernyataan tambahan terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto pada paragraf 9 – 10.

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	<p>Terdapat satu lampiran video yang ditampilkan pada halaman atas artikel. Video tersebut menampilkan sosok Presiden Jokowi yang sedang berbicara mengenai alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja.</p> <p>Kata “Menggenjot Ekonomi” dalam kalimat “Maka dari itu Perppu soal Cipta Kerja diterbitkan demi menggenjot kinerja ekonomi Indonesia.” menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian Indonesia.</p>
-------------------------	-------------------------------------	--

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis pada artikel ini menjelaskan terkait alasan yang melandasi terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Dengan judul artikel “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Jokowi: Kita Diintip Ketidakpastian” menginformasikan bahwa Perppu Cipta Kerja diterbitkan karena alasan ketidakpastian. *Lead* pada artikel menginformasikan tentang Jokowi yang blak – blakan terkait alasan Perppu Cipta Kerja dan latar informasi menjelaskan tentang alasan apa yang menjadi latar belakang Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan kutipan sumber, artikel tersebut berfokus untuk menjelaskan faktor apa yang menjadi alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo terkait ketidakpastian ekonomi global yang mengancam Indonesia. Artikel kemudian ditutup dengan kutipan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang memperjelas alasan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai antisipasi terhadap ancaman ekonomi global. Struktur sintaksis pada artikel terfokus pada alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja.

2. Struktur Skrip

Penerapan kaidah 5W+1H pada artikel ini lengkap. Dalam struktur skrip, ditekankan alasan terkait diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Unsur *why* disini menjelaskan bahwa kondisi dunia sedang tidak baik – baik saja dimana Indonesia sendiri dihantui dengan risiko ketidakpastian ekonomi.

3. Struktur Tematik

Penulis pada artikel ini menyampaikan fakta atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja dengan cara menjelaskan secara terperinci alasan – alasan apa saja yang mendasari yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja termuat pada paragraf 1-8 yang disampaikan oleh Jokowi, dan pernyataan tambahan terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto terdapat pada paragraf 9 – 10.

4. Struktur Retoris

Penulis dalam artikel ini memuat 1 video yang menampilkan visual Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang menjelaskan dasar – dasar alasan atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Pada artikel ini juga memuat kata “menggenjot” pada kalimat “Maka dari itu Perppu soal Cipta Kerja diterbitkan demi menggenjot kinerja ekonomi Indonesia”, yang menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja mampu mendorong perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis *framing*; berita pertama ini dibingkai oleh penulis artikel dengan cara menjelaskan alasan kepentingan dibalik terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

B. Analisis Artikel Berita 2 Detik.com

Judul : Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Perang Ukraina Disinggung

Sumber : Detik.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 dengan kondisi global yang tidak menentu sebagai pertimbangan dalam menerbitkan aturan tersebut. Adapun dasar terbitnya aturan tersebut dijelaskan kembali oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dengan menyinggung perang di Ukraina yang berdampak besar pada dunia seperti krisis energi hingga krisis keuangan. Ia pun menjelaskan bahwa putusan MK terkait Perppu Ciptaker ini sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

Tabel 4. 2 Analisis Artikel Berita 2 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Perang Ukraina Disinggung.
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kondisi global yang tidak menentu menjadi pertimbangan Jokowi menerbitkan Perppu tersebut.
	Latar Informasi	Airlangga Hartanto selaku Menko Perekonomian menyinggung bahwa perang di Ukraina memiliki dampak besar pada dunia serta krisis keuangan dan energi yang melanda sejumlah negara menjadi latar belakang terbitnya Perppu Cipta Kerja.
	Kutipan Sumber	Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global peningkatan inflasi kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga 30," 2. "Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik, perang Ukraina Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," 3. "Terkait putusan MK, terkait UU Ciptaker ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari UU Ciptaker," 4. "Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK,"
	Pernyataan Opini Penutup	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang mengatakan: "Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK,".
Struktur Skrip	What	Perlu adanya antisipasi kepastian hukum akibat Perang di Ukraina.
	Where	Istana Negara.

	When	30 Desember 2022.
	Who	Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.
	Why	Bentuk kepastian hukum berpengaruh sebagai antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.
	How	Mengeluarkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 untuk mengisi kepastian hukum.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Pada artikel ini dijelaskan terkait alasan yang menjadi pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja dalam paragraf 1 – 4. Kemudian dijelaskan terkait pentingnya kepastian hukum pada paragraf 5 – 7.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Terdapat satu lampiran video yang ditampilkan pada halaman atas artikel. Video tersebut menampilkan sosok Presiden Jokowi yang sedang berbicara mengenai alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “Menyinggung” dalam kalimat “Airlangga juga menyinggung perang di Ukraina yang berdampak besar bagi kondisi dunia,” menegaskan bahwa alasan perang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpastian global.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Dalam artikel ini penulis menekankan bahwa diperlukan adanya kepastian hukum untuk mengantisipasi ancaman pada perekonomian Indonesia akibat adanya ketidakpastian global. Hal ini selaras dengan latar informasi yang disajikan yang menekankan bahwa perang di Ukraina memiliki dampak besar pada dunia serta krisis keuangan dan energi yang melanda sejumlah negara menjadi latar belakang terbitnya Perppu Cipta Kerja. Namun *lead* berita pada artikel ini lebih menekankan pada sosok Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Perppu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 yang didasari atas kondisi global yang tidak menentu. Artikel ini tidak memuat opini penulis. Kutipan sumber pada artikel ini menjelaskan terkait dasar – dasar apa saja yang menjadi alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja yang akan berpengaruh pada kondisi ekonomi. Kemudian, artikel ditutup dengan kutipan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartato yang menjelaskan bahwa Perppu dikeluarkan sebagai bentuk kepastian hukum.

2. Struktur Skrip

Penerapan kaidah 5W+1H pada artikel ini lengkap. Dalam struktur skrip, ditekankan alasan terkait diterbitkannya Perppu Cipta Kerja ini ialah untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan mengisi kepastian hukum. Unsur *what* disini menonjolkan bahwa adanya peperangan di Ukraina menjadi salah satu alasan terkait adanya ketidakpastian global terutama pada sektor ekonomi.

3. Struktur Tematik

Struktur tematik pada artikel ini menekankan pada alasan – alasan yang menjadi dasar terbitnya Perppu Cipta Kerja. Pada artikel ini dijelaskan terkait alasan yang menjadi pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja dalam paragraf 1 – 4. Kemudian dijelaskan terkait pentingnya kepastian hukum pada paragraf 5 – 7.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan video Presiden Joko Widodo dengan visual Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang menjelaskan dasar – dasar alasan atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “Menyinggung Perang” dalam kalimat “Airlangga juga menyinggung perang di Ukraina yang berdampak besar bagi kondisi dunia,” menegaskan bahwa alasan perang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpastian global. Berdasarkan analisis *framing*; berita kedua dibingkai dengan cara menekankan bahwa Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi ini merupakan sebuah langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman ketidakpastian global akibat perang Rusia dengan Ukraina yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

C. Analisis Artikel Berita 3 Detik.com

Judul : Jokowi Jawab Kritik soal Perppu Ciptaker: Ini Untuk Kepastian Hukum

Sumber : Detik.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Presiden Jokowi menjawab terkait kritik pada Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan dengan dasar adanya kondisi ancaman global. Jokowi pun menegaskan bahwa hal ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum atas kondisi global yang kurang baik. Kepastian hukum yang diberikan akan mengisi kekosongan hukum pada persepsi investor dalam maupun luar. Sebelumnya, Perppu ini juga dinilai sebagai pembangkangan konstitusi oleh Koordinator Tim Kuasa Penggugat UU Ciptaker yakni Viktor Santoso Tandiasa.

Tabel 4. 3 Analisis Artikel Berita 3 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Jawab Kritik soal Perppu Ciptaker: Ini Untuk Kepastian Hukum.
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritik soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jokowi mengatakan Perppu dikeluarkan lantaran kondisi dunia yang diliputi berbagai ancaman.
	Latar Informasi	Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi dengan dasar memenuhi kepastian hukum dinilai merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
	Kutipan Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Jadi memang kenapa perppu, kita tahu kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global, saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14. Yang 28 ngantre di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien," 2. "Kemudian sebetulnya dunia tidak sedang baik-baik saja, ancaman-ancaman, risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor, baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu, yang paling penting karena ekonomi di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor," Viktor Santoso Tandiasa (Koordinator Tim Kuasa Penggugat UU Ciptaker) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU No 11 Tahun 2020 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sampai diperbaiki prosedur pembentukannya

dengan batas waktu 2 tahun (November 2023), saya menyatakan tindakan ini adalah bentuk tindakan perbuatan melanggar hukum pemerintah atas putusan MK,"

2. "Bahkan dapat dikatakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, di mana amanat MK adalah memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik, namun pemerintah malah mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dalam penalaran yang wajar DPR akan menyetujui perppu tersebut menjadi UU sehingga tidak melaksanakan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020,"
3. "Sebagaimana amanat Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam 2 Tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen, namun ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan 2 tahun ini untuk memperbaiki, tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan perppu,"

Anwar Usman (Ketua MK)

1. "Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan,"
2. "Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali,"
3. "Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,"

**Pernyataan Opini
Penutup**

Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.
Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Ketua MK, Anwar Usman yang mengatakan: "Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,"

Struktur Skrip

What

Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan untuk kepastian hukum dinilai membangkang konstitusi.

Where

Istana Negara.

When

30 Desember 2022

	Who	Presiden Joko Widodo, Viktor Santoso Tandiasa, Anwar Usman.
	Why	Terbitnya Perppu Cipta Kerja diduga sebagai jalan pintas pemerintah agar UU Ciptaker tak inkonstitusional permanen.
	How	Permohonan <i>judicial review</i> UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi dan harus melibatkan partisipasi publik.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Pada artikel ini dijelaskan terkait alasan yang menjadi pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja dalam paragraf 1 – 4. Selanjutnya paragraf 5 – 15 menjelaskan terkait proses penggugatan Perppu Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Terdapat foto yang menyorot Presiden Joko Widodo diantara dua menteri, yang menggambarkan proses konferensi pers oleh Presiden Jokowi. Terdapat kata “dunia sedang tidak baik – baik saja” dan “pembangkangan” yang menggambarkan terdapat adanya penolakan dibalik alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel ini menekankan pada kontra atas penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang dinilai inkonstitusional dan mengabaikan partisipasi masyarakat. Judul artikel “Jokowi Jawab Kritik soal Perppu Ciptaker: Ini Untuk Kepastian Hukum” menjelaskan bahwa adanya penolakan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja. *Lead* dan latar informasi menjelaskan hal yang serupa dengan judul berita dimana menegaskan terkait adanya kontra atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Merujuk pada kutipan sumber yang dicantumkan pada artikel, penulis ingin menyampaikan kronologi penolakan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional. Artikel kemudian ditutup dengan kutipan dari pihak Ketua MK, Anwar Usman yang menyampaikan terkait Perppu Cipta Kerja yang akan memiliki dampak yang luas.

2. Struktur Skrip

Dalam artikel ini, penerapan kaidah 5W+1H dijabarkan secara lengkap. Pada struktur skrip yang ditekankan oleh penulis disini ialah terkait terbitnya Perppu Cipta Kerja yang menuai kritik yang dinilai membangkang konstitusi. Unsur *why* disini menjelaskan bahwa terbitnya Perppu Cipta

Kerja diduga sebagai jalan pintas pemerintah agar UU Ciptaker tak inkonstitusional permanen.

3. Struktur Tematik

Pada artikel ini dijelaskan terkait hal – hal apa saja yang menjadi pertimbangan terbitnya Perppu Cipta Kerja pada paragraf 1 – 4. Kemudian, penulis disini menuliskan fakta dan menjelaskan secara keseluruhan pada paragraf 5 – 15 terkait proses penggugatan Perppu Cipta Kerja. Struktur tematik disini menekankan pada pada proses keseluruhan penggugatan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris Penulis memuat foto Presiden Jokowi yang sedang melakukan konferensi diantara kedua menteri lainnya. Namun, pada foto tersebut lebih menyorot pada Jokowi. Terdapat kata “dunia sedang tidak baik – baik saja” dan “pembangkangan” yang menggambarkan terdapat adanya penolakan dibalik alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan analisis *framing*; berita ketiga ini dibingkai oleh penulis dengan cara menekankan pada kritik – kritik yang dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu, serta jawabannya terhadap kritik tersebut.

D. Analisis Artikel Berita 4 Detik.com

Judul : Pro – Kontra Tercipta Usai Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Sumber : Detik.com

Tanggal : 1 Januari 2023

Ringkasan : Usai diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi, muncul beberapa pro dan kontra. Jokowi menegaskan bahwa aturan tersebut diterbitkan demi adanya kepastian hukum yang mengisi kekosongan hukum yang ada pada persepsi investor. Namun, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengkritik atas penerbitannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang juga meminta DPR untuk menolak Perppu tersebut.

Tabel 4. 4 Analisis Artikel Berita 4 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pro – Kontra Tercipta Usai Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja.
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Usai Perppu diterbitkan, muncul pro dan kontra.
	Latar Informasi	Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi dengan dasar memenuhi kepastian hukum menuai pro – kontra.
	Kutipan Sumber	<p>Joko Widodo (Presiden RI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Jadi memang kenapa perppu, kita tahu kita ini kelihatannya normal tapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global, saya sudah berkali-kali menyampaikan beberapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 14. Yang 28 ngantre di depan pintunya IMF untuk juga menjadi pasien." 2. "Kemudian sebetulnya dunia tidak sedang baik-baik saja, ancaman-ancaman, risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi investor, baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu, yang paling penting karena ekonomi di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor," <p>Gita Putri (Direktur Eksekutif PHSK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Menurut Pemerintah, kehadiran Perppu Ciptaker telah memenuhi syarat dibentuknya sebuah Perppu yakni adanya kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum. Pernyataan ini tidak berdasar dan patut dipertanyakan logikanya, mengingat MK dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 mensyaratkan UU Ciptaker untuk diulang proses pembentukannya dengan memerhatikan salah satunya mengenai partisipasi yang bermakna. Penerbitan Perppu adalah seperti siasat sehingga secara keseluruhan seolah mengkhianati amanah MK demi mengakali syarat partisipasi bermakna ini," 2. "Terlihat bahwa ada perbedaan dalam pelibatan pihak-pihak terdampak dalam proses legislasi. Contohnya bisa dilihat dari penyusunan Omnibus Cipta Kerja di tahun 2019 hingga KUHP di tahun 2022. Hanya mereka yang memiliki kepentingan sama dengan Pemerintah yang mendapat karpet merah mendapat panggung untuk didengar. Namun kelompok buruh, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama, kelompok minoritas seksual, serta

kelompok masyarakat rentan lainnya justru terdiskriminasi dengan tidak mendapat ruang dan pelibatan secara aktif dalam penyusunan produk hukum tersebut,"

3. "Di samping banyaknya pertanyaan dan polemik yang ditimbulkan dari penerbitan Perppu Ciptaker, celakanya sampai dengan rilis ini disusun dokumen Perppu Ciptaker belum dapat diakses. Hal itu menguatkan kesan bahwa Pemerintah semakin menarik proses pembentukan peraturan perundang-undangan ke ruang gelap. Padahal prinsip transparansi adalah prasyarat terbukanya ruang partisipasi yang bermakna,"

Said Iqbal (Presiden Partai Buruh)

1. "Jadi Perppu boleh, maka kami gunakan pendapat pertama daripada dikasih DPR yang kami mosi tidak percaya,"
2. "(Meskipun) alasan pemerintah dengan partai buruh beda, kedaruratan sudah saya sebut tadi, darurat upah nggak pernah naik, darurat outsourcing merajalela, gampang di PHK, easy hiring, easy firing, darurat pekerja kontrak berulang ulang darurat pesangon kecil,"
3. "Dengan dasar itulah maka kami memilih Perppu,"
4. "Bilamana isi Perppu tidak sesuai harapan yang diusulkan Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja tentu kami tolak Perppu. Tentu ada langkah hukum kembali tentukan judisial langkah perjuangan melakukan aksi,"
5. "Bahkan isi Perppu versi usulan Partai Buruh dan serikat buruh sudah didiskusikan dengan tim Kadin, dialog, sosial dialog. Sikap kami kembali ke UU 13 tahun 2003 yang merah. Jadi nggak main-main daripada dibahas di DPR mosi tidak percaya, hanya politisasi penuh kebohongan waktu itu. Kami nggak mau jatuh di lubang yang sama,"
6. "Saya percaya Presiden Jokowi mendengar asalkan punya argumentasi kuat. Saya berkeyakinan isi Perppu sesuai harapan,"

Mahfud MD (Menko Polhukam)

1. "Aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tertanggal 30 Desember ini adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak. Sesuai dengan putusan MK Nomor 138 PUU 7 2009 yang waktu itu saya sebagai Ketua MK menandatangani,"
2. "Alasan dikeluarkannya perppu itu ya pertama karena ada kebutuhan yang mendesak ya,

		kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada atau sehingga terjadi kekosongan hukum,"
	Pernyataan Opini Penutup	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan: "Alasan dikeluarkannya perppu itu ya pertama karena ada kebutuhan yang mendesak ya, kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada atau sehingga terjadi kekosongan hukum,".
Struktur Skrip	What	Terbitnya Perppu Cipta Kerja menuai pro dan kontra.
	Where	Istana Negara.
	When	1 Januari 2023.
	Who	Joko Widodo (Presiden RI), Gita Putri (Direktur Eksekutif PHSK), Said Iqbal (Presiden Partai Buruh), Mahfud MD (Menko Polhukam).
	Why	Pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi.
	How	Meminta DPR untuk menolak Perppu Cipta Kerja itu karena telah mengabaikan putusan MK.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Pada artikel ini dijelaskan terkait alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja pada paragraf 1 – 5 dan pada paragraf 27 – 30. Selanjutnya, pada paragraf 6 – 16 berisi tentang penolakan atas terbitnya Perppu dan pada paragraf 17 – 26 yang berisi tentang dukungan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Pada artikel ini memuat foto Presiden Jokowi seorang yang terlihat sedang berpidato dan hanya berisi keterangan Presiden Jokowi. Adapun artikel juga memuat video Mahfud MD yang mengungkap alasan Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “mengada-ada” dan “ruang gelap legislasi” yang menegaskan bahwa terjadi adanya penolakan pada Perppu, dimana proses pembuatannya sendiri tidak melibatkan rakyat.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis pada artikel yang disajikan menunjukkan bahwa penulis ingin menginformasikan bahwa terjadi pro dan kontra atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi. Artikel diberi judul “Pro – Kontra Tercipta Usai Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja” yang menjelaskan bahwa terjadi adanya perbedaan pendapat setelah Perppu Cipta Kerja

diterbitkan. *Lead* dan latar informasi pada artikel menegaskan informasi yang sesuai dengan judul yang menjelaskan terjadinya pro dan kontra atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Selanjutnya, penulis menyertakan secara mendetil terkait pihak mana saja yang pro maupun kontra atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Melalui struktur sintaksis, penulis ingin memfokuskan artikel pada penjabaran pro dan kontra yang terjadi usai Perppu Cipta Kerja dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, artikel ini memuat elemen 5W+1H secara lengkap yang disajikan oleh penulis. Pada unsur *why* ditekankan penyebab adanya kontra yang terjadi atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan, artikel ini menyampaikan pro dan kontra yang terjadi usai Perppu Cipta Kerja dikeluarkan. Dalam artikel, pada paragraf 6 – 16 berisi tentang penolakan atas terbitnya Perppu yang disertai dengan upaya yang dilakukan dalam menolak Perppu Cipta Kerja, kemudian pada paragraf 17 – 26 berisi tentang dukungan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja. Adapun alasan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja dijelaskan pada paragraf 1 – 5 dan pada paragraf 27 – 30.

4. Struktur Retoris

Artikel ini memuat foto Presiden Jokowi yang sedang berpidato dengan keterangan Presiden Jokowi saja. Adapun disertakan video Mahfud MD, selaku Menko Polhukam yang menjelaskan terkait alasan – alasan yang mendasari dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja. Selanjutnya, terdapat kata “mengada-ada” dan “ruang gelap legislasi” yang menegaskan bahwa terjadi adanya penolakan pada Perppu, dimana proses pembuatannya sendiri tidak melibatkan rakyat. Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai dengan cara menekankan pihak – pihak mana yang pro dan kontra terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan penilaian dari pihak masing – masing.

E. Analisis Artikel Berita 5 Detik.com

Judul : 9 Pertimbangan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Sumber : Detik.com

Tanggal : 1 Januari 2023

Ringkasan : Pada penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 terdapat sembilan hal yang menjadi pertimbangan Jokowi untuk menerbitkan Perppu tersebut. Salah satu dari alasan tersebut ialah adanya dinamika global yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, serta kenaikan inflasi. Melalui ini, Jokowi ingin meningkatkan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi.

Tabel 4. 5 Analisis Artikel Berita 5 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	9 Pertimbangan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja.
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada sembilan hal yang menjadi pertimbangan Jokowi untuk menerbitkan perppu itu.
	Latar Informasi	Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi memiliki beberapa pertimbangan dan alasan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing di dunia investasi
	Kutipan Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) <ol style="list-style-type: none">1. "Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change, dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja,"
Struktur Skrip	Pernyataan Opini	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan poin pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang mengatakan bahwa diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah.
Struktur Skrip	What	Alasan utama Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja
	Where	Tidak ada unsur <i>where</i> .
	When	1 Januari 2023

	Who	Presiden Joko Widodo
	Why	Terjadinya dinamika global yang menyebabkan adanya inflasi dan perlunya kepastian hukum.
	How	Diberikannya penjelasan terkait pertimbangan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Pada artikel ini dijelaskan terkait pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja pada paragraf 1 – 3 beserta dengan alasan adanya inflasi akibat dinamika global. Selanjutnya pada paragraf 4 – 14 dijelaskan terkait sembilan alasan utama yang menjadi dasar atas dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	<p>Terdapat satu lampiran video yang ditampilkan pada halaman atas artikel. Video tersebut menampilkan sosok Presiden Jokowi yang sedang berbicara mengenai alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja.</p> <p>Terdapat kata “dinamika global” pada kalimat “Salah satu pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah adanya dinamika global yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, serta kenaikan inflasi,” yang menegaskan salah satu alasan dibalik terbitnya Perppu Cipta Kerja.</p>

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel, penulis ingin menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki sembilan alasan atas pertimbangan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Artikel yang berjudul “9 Pertimbangan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja” menekankan bahwa terdapat sembilan alasan utama yang melandasi keluarnya Perppu Cipta Kerja. *Lead* dan latar informasi pada artikel juga menegaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan alasan dibalik Perppu Cipta Kerja demi memberi kepastian hukum dan perkembangan ekonomi. Kutipan sumber dalam artikel ini memuat pernyataan dari Presiden Jokowi yang menjelaskan terkait dinamika global yang akan memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian nasional. Melalui struktur sintaksis, penulis ingin menjelaskan terkait sembilan alasan yang menjadi dasar utama terbitnya Perppu Cipta Kerja.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, artikel ini tidak memuat unsur 5W+1H secara lengkap dimana tidak ada unsur *where* dalam artikel yang dibuat. Dalam artikel ini, unsur *how* lebih ditekankan terkait penjelasan secara terperinci atas dasar diterbitkannya Perppu Cipta Kerja untuk menghadapi dinamika global yang memiliki dampak pada perekonomian nasional.

3. Struktur Tematik

Secara keseluruhan, artikel ini menyampaikan alasan – alasan yang mendasari Perppu Cipta Kerja. Pada artikel dijelaskan terkait pertimbangan penerbitan Perppu Cipta Kerja pada paragraf 1 – 3 beserta dengan alasan adanya inflasi akibat dinamika global. Kemudian dilanjutkan ke paragraf 4 – 14 yang menjelaskan secara terperinci sembilan alasan utama yang menjadi dasar atas dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan video Presiden Joko Widodo dengan visual Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang menjelaskan dasar – dasar alasan atas penerbitan Perppu Cipta Kerja. Dalam artikel terdapat kata “dinamika global” yang menekankan bahwa hal tersebut menjadi penyebab utama yang memberikan dampak pada perekonomian nasional serta penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai untuk memaparkan sembilan alasan utama atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

F. Analisis Artikel Berita 6 Detik.com

Judul : Jokowi Respons Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Dijelaskan

Sumber : Detik.com

Tanggal : 2 Januari 2023

Ringkasan : Diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi memantik pro-kontra di kalangan masyarakat. Jokowi menganggap bahwa terjadi hal tersebut merupakan hal

yang biasa pada setiap terbitnya sebuah regulasi. Sebelumnya, hal tersebut dikritik oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk mendesak Jokowi menarik Perppu Cipta Kerja menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 4. 6 Analisis Artikel Berita 6 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Respons Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Dijelaskan.
	Lead	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantik pro-kontra di kalangan masyarakat. Jokowi menganggap perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan merupakan hal biasa.
	Latar Informasi	Terjadinya pro dan kontra pada regulasi Perppu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo.
	Kutipan Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Ya biasa dalam setiap kebijakan dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra," 2. "Tapi semua bisa kita jelaskan," YLBHI <ol style="list-style-type: none"> 1. "YLBHI menilai penerbitan Perppu ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap Konstitusi RI, dan merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo," 2. "Ini semakin menunjukkan bahwa Presiden tidak menghendaki pembahasan kebijakan yang sangat berdampak pada seluruh kehidupan bangsa dilakukan secara demokratis melalui partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana diperintahkan MK," 3. "Penerbitan Perppu ini jelas tidak memenuhi syarat diterbitkannya Perppu, yakni adanya hal ihwal kepentingan yang memaksa, kekosongan hukum dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan UU seperti biasa," 4. "Menuntut Presiden melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan syarat-syarat yang diperintahkan MK. Menarik kembali Perppu No. 2 Tahun 2022," 5. "Mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip

		konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia,"
	Pernyataan Opini Penutup	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari YLBHI yang mengatakan: "Mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia,"
Struktur Skrip	What	Perppu Cipta Kerja yang memantik pro dan kontra dalam kalangan masyarakat.
	Where	Pasar Tanah Abang.
	When	2 Januari 2023.
	Who	Presiden Joko Widodo, YLBHI.
	Why	Perppu Cipta Kerja dinilai sebagai pembangkangan terhadap konstitusi oleh YLBHI.
	How	Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait perbedaan pendapat atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel berisi tentang tanggapan Presiden Joko Widodo terkait menuainya pro dan kontra yang terjadi karena terbitnya Perppu Cipta Kerja disertai dengan alasan penolakan oleh YLBHI. Pada paragraf 1 – 4 dijelaskan terkait tanggapan Presiden Jokowi terkait perbedaan pendapat. Kemudian pada paragraf 5 – 14 menerangkan terkait alasan YLBHI menolak terbitnya Perppu Cipta Kerja karena dinilai sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan tidak melibatkan masyarakat.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Pada artikel ini terdapat video yang menampilkan sosok Presiden Joko Widodo pada saat kunjungannya ke Pasar Tanah Abang yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat atas kebijakan baru merupakan hal yang umum. Terdapat kata "pengkhianatan", "kudeta", "otoritarianisme", dan "penolakan" yang menekankan adanya kontra atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel, penulis ingin menginformasikan bahwa terjadi adanya pro dan kontra atas dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang baru dan menjelaskan bagaimana kedua pihak menyatakan pendapatnya atas peristiwa tersebut. Artikel dengan judul "Jokowi Respons Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Dijelaskan" menginformasikan bahwa terjadi adanya perbedaan pendapat atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. *Lead* dan latar informasi pada artikel juga menjelaskan bahwa pada kebijakan pemerintah yang baru yakni Perppu Cipta Kerja, memantik pro

dan kontra di kalangan masyarakat. Kutipan sumber pada artikel memberi kejelasan terkait tanggapan – tanggapan atas terjadinya pro dan kontra serta dasar alasan terjadinya perbedaan pendapat. Melalui struktur sintaksis, penulis ingin menjelaskan terkait bagaimana perbedaan pendapat terjadi atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, artikel ini memuat kaidah 5W+1H secara lengkap dimana menginformasikan terkait adanya pro dan kontra atas terbitnya Perppu Cipta, dan bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo akan hal tersebut. Pada artikel ini menekankan unsur *how* tentang bagaimana respon Presiden Jokowi dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut.

3. Struktur Tematik

- Artikel ini menyampaikan bagaimana Presiden Jokowi menanggapi adanya pro dan kontra dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja dan keterangan penolakan oleh YLBHI. Pada artikel dijelaskan terkait bagaimana respon Presiden Jokowi pada paragraf 1 – 4. Selanjutnya pada paragraf 5 – 14 menjelaskan tentang keterangan YLBHI dan sebab atas penolakan yang disampaikan terhadap Perppu Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan video Presiden Jokowi dengan visual dirinya yang sedang mengunjungi Pasar Tanah Abang yang menjelaskan pendapatnya terkait adanya pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian pada artikel terdapat kata “pengkhianatan”, “kudeta”, “otoritarianisme”, dan “penolakan” yang menekankan bahwa adanya perbedaan pendapat atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai untuk menjelaskan bagaimana respon Presiden Jokowi menghadapi pro dan kontra serta alasan – alasan yang mendasari adanya perbedaan pendapat oleh YLBHI.

4.2.2 Analisis Framing Berita CNNIndonesia.com

A. Analisis Artikel Berita 1 CNNIndonesia.com

Judul : Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Sumber : CNNIndonesia.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa salah satu alasannya ialah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Terkait hal ini, Mahfud MD selaku Menko Polhukam, menyatakan bahwa perang tersebut dapat memberikan dampak perkembangan ekonomi kepada banyak negara dimana salah satunya ialah Indonesia. Akan hal tersebut maka terjadi desakan pada pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja.

Tabel 4. 7 Analisis Artikel Berita 7 CNNIndonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja.
	Lead	Perang Ukraina dengan Rusia menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
	Latar Informasi	Adanya situasi perang antara Rusia dengan Ukraina memiliki dampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga pemerintah membutuhkan langkah cepat sebagai antisipasi.
	Kutipan Sumber	Mahfud MD (Menko Polhukam) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina," 2. "Kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK Nomor 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi," Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022,"
Pernyataan Opini		Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.

	Penutup	Artikel ini ditutup dengan penjelasan atas pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartato oleh penulis yang menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja memenuhi syarat kegentingan memaksa.
Struktur Skrip	What	Terbitnya Perppu Cipta Kerja dengan alasan perang Rusia dan Ukraina.
	Where	Kantor Presiden.
	When	30 Desember 2022.
	Who	Presiden Jokowi, Mahfud MD, Airlangga Hartanto.
	Why	Situasi perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan dampak perekonomian dunia termasuk Indonesia.
	How	Menerbitkan Perppu Cipta Kerja dengan syarat kegentingan yang mendesak sebagai langkah antisipasi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel ini menjelaskan mengapa perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Pada paragraf 1 menekankan terkait diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pada paragraf 2 – 10 menjelaskan secara detil mengapa Presiden Jokowi mengatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Pada artikel ini terdapat foto Presiden Jokowi yang digambarkan sedang melakukan konferensi bersama dengan Mahfud MD disebelah kirinya yang diberi penjelasan perang Ukraina dan Rusia menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “dalih” pada judul artikel “Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja” dimana menekankan alasan yang dibuat oleh Presiden Jokowi atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel, penulis menekankan bahwa adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina menjadi dalih atau alasan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sebagai dasar atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 sebagai keperluan yang mendesak dan juga berlaku sebagai antisipasi krisis perekonomian di Indonesia. Artikel yang berjudul “Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja” menekankan bahwa perang tersebut menjadikan alasan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo. *Lead* dan latar informasi pada artikel menjelaskan bahwa perang tersebut memberikan dampak bagi perekonomian dunia

termasuk Indonesia sendiri. Selanjutnya, kutipan sumber dalam artikel ini memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang mengapa perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Melalui struktur sintaksis, penulis disini ingin menekankan tentang alasan perang Rusia dan Ukraina yang menjadi dasar terbitnya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, kaidah 5W+1H terpenuhi secara lengkap yang menginformasikan terkait alasan perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia yang menjadi landasan terbitnya Perppu Cipta Kerja. Dalam artikel ini menekankan unsur *why* yang menjelaskan tentang situasi perang antara Rusia dan Ukraina yang dikatakan memiliki dampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia.

3. Struktur Tematik

Pada artikel ini disampaikan terkait alasan perang Rusia dan Ukraina sebagai salah satu landasan terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pada paragraf 1 menekankan terkait diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, paragraf 2 – 10 menjabarkan secara detil mengapa Presiden Jokowi mengatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan foto Presiden Jokowi bersama dengan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD, yang duduk disampingnya dan menggambarkan suasana pada saat dilakukannya konferensi. Adapun pada artikel terdapat kata “dalih” yang menekankan bahwa perang Rusia dan Ukraina menjadi alasan yang dibuat oleh Presiden Jokowi atas dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai oleh penulis bahwa perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan ketidakpastian global menjadi alasan yang dibuat – buat dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

B. Analisis Artikel Berita 2 CNNIndonesia.com

Judul : Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi

Terbitkan Perppu

Sumber : CNNIndonesia.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Presiden Jokowi dinilai melanggar hukum karena mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 dimana seharusnya memperbaiki UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 bersama dengan DPR dan melibatkan partisipasi publik dalam prosesnya.

Tabel 4. 8 Analisis Artikel Berita 8 CNNIndonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi Terbitkan Perppu.
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melawan hukum dan membangkang konstitusi karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.
	Latar Informasi	Pemerintah dinilai telah melanggar hukum dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja serta mengambil jalan pintas karena tidak memperbaiki UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
	Kutipan Sumber	Viktor Santoso Tandiasa (Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Cipta Kerja) <ol style="list-style-type: none">1. "Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang mencabut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi,"2. "Sebagaimana amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen. Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun ini untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu," Mahfud MD (Menko Polhukam) <ol style="list-style-type: none">1. "Perppu itu setara dengan Undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa,"
Pernyataan Opini	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.	

	Penutup	Artikel ditutup dengan kutipan dari Menko Polhukam yakni Mahfud MD yang mengatakan: "Perppu itu setara dengan Undang-undang di peraturan hukum kita. Kalau ada alasan mendesak, bisa,"
Struktur Skrip	What	Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dinilai membangkang konstitusi.
	Where	Tidak memuat unsur <i>where</i> .
	When	30 Desember 2020.
	Who	Presiden Jokowi, Viktor Santoso T, Mahfud MD, Airlangga Hartanto.
	Why	Pemerintah seharusnya memprioritaskan UU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2020 dengan melibatkan publik dengan tidak mengambil jalan pintas menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.
	How	Dilakukan penggugatan terhadap pemerintah oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel ini menjelaskan tentang penggugatan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi. Pada paragraf 1 menekankan pada sosok Presiden Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta kerja yang dinilai melanggar hukum. Selanjutnya, paragraf 2 – 5 menjelaskan tentang penggugatan yang dilakukan kepada pemerintah. Paragraf 6 – 9 diberikan penjelasan Perppu Cipta Kerja yang dapat dikeluarkan apabila ada kepentingan yang mendesak.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Pada artikel ini terdapat foto Presiden Jokowi yang digambarkan sedang melakukan pidato dengan gestur tangan yang terkesan menolak disertai penjelasan Presiden Jokowi yang dinilai melawan hukum dan membangkang konstitusi karena menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “membangkang”, “melawan hukum”, dan “mengambil jalan pintas” yang menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja ialah sebuah pelanggaran pada konstitusi.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dalam artikel menegaskan bahwa langkah penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi dinilai telah melanggar hukum dan dikatakan mengambil jalan pintas karena tidak memperbaiki UU Cipta Kerja sebelumnya. Artikel dengan judul “Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi Terbitkan Perppu” menerangkan bahwa Presiden Jokowi dinilai telah melanggar hukum karena menerbitkan Perppu Cipta Kerja. *Lead* dan latar informasi pada artikel ini

sesuai dengan judul yang menjelaskan terkait penggugatan pada Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagaimana pada kutipan sumber diberikan penjelasan terkait hal apa yang mendasari penggugatan, serta keterangan atas prosedur diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Melalui struktur sintaksis artikel, penulis ingin menggambarkan penggugatan pada Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah melanggar hukum dan mengabaikan beberapa proses seperti partisipasi rakyat dalam proses penerbitannya.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, kaidah 5W+1H tidak terpenuhi pada unsur *where* terkait dimana tempat pihak – pihak saat memberikan pernyataan terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja. Artikel ini menekankan unsur *why* terkait alasan – alasan penggugatan yang dilakukan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.

3. Struktur Tematik

Artikel ini menyampaikan terkait hal yang mendasari gugatan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Paragraf 1 menekankan pada sosok Presiden Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta kerja yang dinilai melanggar hukum. Selanjutnya, paragraf 2 – 5 menjelaskan tentang penggugatan yang dilakukan kepada pemerintah. Kemudian paragraf 6 – 9 diberikan penjelasan Perppu Cipta Kerja yang dapat dikeluarkan apabila ada kegentingan yang mendesak.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan foto Presiden Jokowi yang sedang melakukan pidato dengan gestur yang menonjol yakni melambaikan tangannya. Melalui foto tersebut juga diberikan penjelasan Presiden Jokowi dinilai melawan hukum dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Selanjutnya, pada artikel terdapat kata “membangkang”, “melawan hukum”, dan “mengambil jalan pintas”. Kata – kata tersebut menegaskan bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja ialah sebuah pelanggaran pada konstitusi. Berdasarkan analisis *framing*; penulis disini ingin menekankan sosok

Presiden Jokowi yang membangkang konstitusi atau melanggar hukum dengan cara mengeluarkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.

C. Analisis Artikel Berita 3 CNNIndonesia.com

Judul Jokowi Ungkap Alasan Keterdesakan Perppu Cipta Kerja: Ancaman Global

Sumber : CNNIndonesia.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Situasi Indonesia yang dihantui dengan ancaman ketidakpastian global menjadi alasan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 guna memberikan kepastian hukum kepada investor luar maupun dalam negeri. Dikatakan bahwa Perppu Cipta Kerja sendiri ialah setara dengan undang – undang di hukum Indonesia dan memenuhi persyaratan kegentingan memaksa dalam penerbitannya meskipun menuai kritik di beberapa kalangan masyarakat.

Tabel 4. 9 Analisis Artikel Berita 9 CNNIndonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Ungkap Alasan Keterdesakan Perppu Cipta Kerja: Ancaman Global
	Lead	Presiden Jokowi menyebut situasi Indonesia yang terlihat normal saat ini sebenarnya masih diliputi ketidakpastian global.
	Latar Informasi	Adanya ancaman ketidakpastian global melandasi penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
	Kutipan Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara pasien IMF 14, yang 28 mengantre di depan pintunya IMF," 2. "Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor,"

Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian)

		<p>1. "Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022,"</p> <p>Viktor Santoso T (Koor Tim Kuasa Hukum Penggugat Perppu Cipta Kerja)</p> <p>1. "Sebagaimana amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen. Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun ini untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu,"</p>
	Pernyataan Opini	Artikel ini tidak memuat pernyataan opini dari wartawan.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang menjelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja dapat mengubah beberapa kebijakan dalam UU Cipta Kerja berdasarkan putusan MK.
Struktur Skrip	What	Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan karena adanya ketidakpastian global.
	Where	Kantor Presiden.
	When	30 Desember 2022.
	Who	Presiden Joko Widodo, Viktor Santoso T, Mahfud MD, Airlangga Hartanto.
	Why	Diperlukan adanya kepastian hukum untuk mengantisipasi masalah pada perekonomian Indonesia.
	How	Menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang juga memperbaiki sebagian aturan dalam UU Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel ini menjelaskan tentang ancaman – ancaman resiko ketidakpastian yang melandasi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Pada paragraf 1 – 6 menekankan pada jawaban Presiden Jokowi terkait risiko ketidakpastian yang mendasari terbitnya Perppu Cipta Kerja. Paragraf 7 – 8 dan 12 – 13 menjelaskan secara lebih lanjut mengapa Perppu Cipta Kerja memenuhi syarat untuk mengubah beberapa ketentuan pada UU Cipta Kerja dan layak untuk diterbitkan. Sementara, pada paragraf 9 – 11 menekankan pada pihak penggugat Perppu Cipta Kerja yang menganggap bahwa kebijakan tersebut ialah pelanggaran terhadap konstitusi.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	<p>Pada artikel ini terdapat foto yang memfokuskan sosok Presiden Jokowi dan menggambarkan ekspresi wajahnya pada saat melakukan konferensi dengan penjelasan bahwa Presiden Jokowi mengatakan Perppu Cipta Kerja ialah untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi ketidakpastian global.</p> <p>Terdapat kata “ketidakpastian” dan “kegentingan” yang menjelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja harus segera diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.</p>

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis pada artikel ini menjelaskan bahwa alasan ketidakpastian global menjadi landasan utama atas terbitnya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Artikel yang diberikan judul “Jokowi Ungkap Alasan Keterdesakan Perppu Cipta Kerja: Ancaman Global” menjelaskan bahwa sesegera mungkin Perppu Cipta Kerja harus dikeluarkan untuk mengantisipasi adanya ancaman global. *Lead* dan latar informasi pada artikel juga selaras dengan judul dimana dengan adanya ancaman tersebut diperlukan adanya kepastian hukum demi kemajuan perekonomian Indonesia. Kemudian pada kutipan sumber, diberikan penjelasan terkait mengapa ancaman global dijadikan sebagai alasan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja dan juga disertakan adanya gugatan atas aturan tersebut yang dianggap telah melanggar konstitusi. Melalui struktur sintaksis, penulis ingin menjelaskan terkait alasan ancaman global yang menjadi alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja. Namun, di satu sisi penulis juga ingin menyampaikan adanya gugatan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja yang dinilai sebagai pembangkangan terhadap konstitusi.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, kaidah 5W+1H pada artikel berita terpenuhi dan menekankan pada unsur *why*. Artikel ini terfokus pada penjelasan alasan terkait ancaman global yang menjadi dasar terbitnya Perppu Cipta Kerja.

3. Struktur Tematik

Artikel ini menjelaskan tentang ancaman ketidakpastian global yang mendasari terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo dan menyertakan adanya penggugatan atas keluarnya aturan tersebut. Pada paragraf 1 – 6 menekankan pada jawaban Presiden Jokowi terkait risiko ketidakpastian yang mendasari terbitnya Perppu Cipta Kerja. Paragraf 7 – 8 dan 12 – 13 menjelaskan secara lebih lanjut mengapa Perppu Cipta Kerja memenuhi syarat untuk mengubah beberapa ketentuan pada UU Cipta Kerja dan layak untuk diterbitkan. Sementara, pada paragraf 9 – 11 menekankan

pada pihak penggugat Perppu Cipta Kerja yang menganggap bahwa kebijakan tersebut ialah pelanggaran terhadap konstitusi.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan foto sosok Presiden Jokowi dan menggambarkan ekspresi wajahnya pada saat melakukan konferensi dengan penjelasan bahwa Presiden Jokowi mengatakan Perppu Cipta Kerja ialah untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi ketidakpastian global. Selanjutnya, terdapat kata “ketidakpastian” dan “kegentingan” yang menjelaskan bahwa Perppu Cipta Kerja harus segera diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis *framing*; penulis disini ingin menekankan alasan ancaman ketidakpastian global yang menjadi salah satu landasan Presiden Jokowi dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja serta menyertakan gugatan oleh salah satu pihak yang menganggap bahwa aturan tersebut telah melanggar konstitusi.

D. Analisis Artikel Berita 4 CNNIndonesia.com

Judul : Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing

Sumber : CNNIndonesia.com

Tanggal : 30 Desember 2022

Ringkasan : Beberapa media internasional turut meliput diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 oleh Presiden Joko Widodo dengan menyorot tanggapan dari beberapa hukum yang menganggap Perppu ini sebagai jalan pintas untuk melewati UU Cipta Kerja.

Tabel 4. 10 Analisis Artikel Berita 10 CNNIndonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing.
	Lead	Sejumlah media massa asing menyoroti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang diterbitkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (30/12).

	Latar Informasi	Media massa luar negeri turut menyorot kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja melalui beberapa pakar hukum Indonesia yang dinilai menggugurkan UU Cipta Kerja sebelumnya yang inkonstitusional.
	Kutipan Sumber	<p>Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," <p>Reuters (Media Internasional)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Menko Perekonomian Jokowi, Airlangga Hartanto mengatakan pertimbangan utama dalam mengeluarkan aturan darurat itu adalah risiko resesi global pada 2023, konflik di Ukraina, potensi krisis pangan, energi dan moneter global, serta perubahan iklim,"
	Pernyataan Opini	Artikel ini memuat opini yang menyebutkan bahwa Perppu Cipta Kerja dalam penerbitannya alih – alih seperti merevisi putusan Mahkamah Konstitusi pada kalimat “alih-alih merevisi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setahun lalu,”.
	Penutup	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang mengatakan: "Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi,"
Struktur Skrip	What Where When Who Why How	<p>Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo disoroti oleh beberapa media internasional.</p> <p>Konferensi Pers Virtual.</p> <p>30 Desember 2022.</p> <p>Presiden Joko Widodo, Mahfud MD, Bivitri Susanti, Airlangga Hartanto.</p> <p>Perppu Cipta Kerja dianggap sebagai jalan pintas untuk melewati proses dari UU Cipta Kerja yang inkonstitusional.</p> <p>Menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja merupakan antisipasi resesi global di tahun 2023.</p>
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel berisi penjelasan terkait media – media yang menyoroti Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo melalui pakar hukum Indonesia beserta alasan diterbitkannya Perppu oleh pihak menteri kabinet Jokowi. Paragraf 1 – 2 menekankan bahwa Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi disoroti oleh media asing dan memiliki alasan yang dibuat – buat. Paragraf ke 3 menjelaskan terkait Perppu yang menggugurkan inkonstitusionalitas bersyarat UU Cipta Kerja. Selanjutnya, pada paragraf 4 – 15 menekankan pada media – media yang menyoroti Perppu Cipta Kerja. Pada

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	<p>paragraf 16 – 19 menjelaskan terkait alasan mengapa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan.</p> <p>Pada artikel ini terdapat video yang menampilkan sosok Presiden Joko Widodo dengan gestur mengerahkan tangannya yang menggambarkan suasana pada saat konferensi beserta penjelasan foto Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang membuat UU Cipta Kerja jadi tidak berlaku.</p> <p>Terdapat kata “alih – alih”, “konyol”, dan “polemik” yang menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja yang disorot oleh media asing mengandung alasan tersendiri dan memicu perbedaan perbedaan pendapat.</p>
-------------------------	-------------------------------------	---

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel, penulis ingin menginformasikan bahwa banyak dari media internasional yang menyoroti kebijakan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo melalui pakar hukum Indonesia yang dinilai sebagai jalan pintas dari proses UU Cipta Kerja dan melanggar konstitusi. Artikel dengan judul “Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing” menjelaskan bahwa adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia meluas kabarnya sampai kancan internasional. *Lead* dan latar informasi di artikel juga sesuai dengan judul yang menjelaskan bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo ini menjadi sorotan media internasional. Kutipan sumber juga memberikan keterangan terkait media internasional yang memberitakan terkait alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Melalui struktur sintaksis, penulis ingin memberikan informasi terkait bagaimana media internasional meliput kebijakan pemerintah seputar Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, artikel ini memuat kaidah 5W+1H secara lengkap yang menjelaskan terkait bagaimana media luar memberitakan berita seputar Perppu Cipta Kerja melalui pakar hukum Indonesia. Artikel ini menekankan unsur *how* terkait pandangan dan bagaimana media

internasional meliputi pemberitaan soal diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

3. Struktur Tematik

Berdasarkan struktur tematik, artikel ini menjelaskan terkait bagaimana media luar meliputi kebijakan seputar Perppu Cipta Kerja beserta alasan diterbitkannya aturan tersebut oleh menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Paragraf 1 – 2 menekankan bahwa Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi disoroti oleh media asing dan memiliki alasan yang dibuat – buat. Paragraf ke 3 menjelaskan terkait Perppu yang menggugurkan inkonstitusionalitas bersyarat UU Cipta Kerja. Selanjutnya, pada paragraf 4 – 15 menekankan pada media – media yang menyoroti Perppu Cipta Kerja. Pada paragraf 16 – 19 menjelaskan terkait alasan mengapa Perppu Cipta Kerja dikeluarkan.

4. Struktur Retoris

Penulis artikel disini melampirkan foto Presiden Jokowi yang digambarkan sedang melakukan penjelasan pada saat melakukan konferensi dengan penjelasan Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang membuat UU Cipta Kerja yang secara inkonstitusional bersyarat diputuskan oleh MK jadi tak berlaku. Selanjutnya, pada artikel terdapat kata “alih – alih”, “konyol”, dan “polemik” yang menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja yang disorot oleh media asing mengandung alasan tersendiri dan memicu perbedaan perbedaan pendapat.

Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai oleh penulis guna menjelaskan bagaimana media internasional meliputi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait Perppu Cipta Kerja melalui pakar hukum Indonesia yang dinilai melanggar hukum dan mengundang kontroversi di kalangan masyarakat.

E. Analisis Artikel Berita 5 CNNIndonesia.com

Judul : Daftar Kegentingan Memaksa yang Bikin Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker

Sumber : CNNIndonesia.com

Tanggal : 3 Januari 2023

Ringkasan : Terdapat beberapa kebutuhan mendesak yang harus diantisipasi oleh pemerintah melalui Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 serta diperlukan adanya kepastian hukum. Adapun Presiden Joko Widodo menjabarkan secara terperinci terkait apa saja hal yang menjadi kegentingan memaksa melalui halaman salinan awal Perppu Cipta Kerja yang memenuhi parameter guna menjadi dasar hukum yang kuat.

Tabel 4. 11 Analisis Artikel Berita 11 CNNIndonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Daftar Kegentingan Memaksa yang Bikin Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker.
	Lead	Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat (30/12).
	Latar Informasi	Adanya ancaman risiko ketidakpastian global membuat Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mengisi kekosongan hukum serta memiliki daftar terkait beberapa hal lainnya yang menjadi kebutuhan mendesak.
	Kutipan Sumber	Joko Widodo (Presiden RI) 1. "Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor," Mahfud MD (Menko Polhukam)
	Pernyataan Opini	1. "Secara prosedural pembuatan Perppu untuk memenuhi tuntutan UU yang inkonstitusional bersyarat adalah bisa asal ada kondisi kegentingan. Kegentingan adalah hak subjektif Presiden. Tinggal diuji,"
Penutup	Tidak ada pernyataan opini penulis pada artikel. Artikel ditutup dengan keterangan beberapa pertimbangan yang mendasari Perppu Cipta Kerja yang sudah memenuhi syarat kebutuhan mendesak serta memberikan kepastian hukum.	

Struktur Skrip	What	Terdapat beberapa daftar kegentingan memaksa yang melandasi terbitnya Perppu Cipta Kerja.
	Where	Twitter
	When	3 Januari 2022.
	Who	Presiden Joko Widodo, Mahfud MD.
	Why	Adanya ancaman global dan kekosongan hukum.
	How	Menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 dengan memberikan daftar kegentingan yang memaksa.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel ini menjelaskan terkait alasan dan daftar kegentingan yang memaksa dimana menjadi pertimbangan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja. Paragraf 1 – 6 menjelaskan terkait alasan dibalik Perppu Cipta Kerja dan kondisi apa yang terpenuhi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Kemudian, paragraf 7 – 21 menjelaskan terkait daftar yang menjadi pertimbangan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Artikel ini melampirkan foto Presiden Joko Widodo yang digambarkan sedang melakukan pidato dengan penjelasan Presiden Jokowi yang mengklaim bahwa terdapat beberapa kegentingan memaksa untuk mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “ketidakpastian” dan “kegentingan” yang menekankan alasan dari terbitnya aturan yang diterbitkan.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis artikel, penulis ingin menginformasikan terkait alasan yang menjadi landasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja dan daftar kegentingan apa saja yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Artikel yang berjudul “Daftar Kegentingan Memaksa yang Bikin Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker” ini menekankan bahwa terdapat penjelasan berupa daftar pertimbangan atas terbitnya Perppu Cipta Kerja. *Lead* dan latar informasi pada artikel sesuai dengan judul yang menjelaskan bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja memiliki beberapa alasan seperti ketidakpastian global dan pertimbangan lainnya. Kutipan sumber juga memberikan penjelasan terkait alasan – alasan yang menjadi dasar dan mengapa Perppu Cipta Kerja telah memenuhi syarat kegentingan memaksa untuk dikeluarkan. Melalui struktur sintaksis, penulis ingin menginformasikan terkait daftar yang menjadi pertimbangan dan alasan dibalik terbitnya Perppu Cipta Kerja.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, kaidah 5W+1H terpenuhi dalam artikel. Selanjutnya, artikel ini terfokus pada unsur *what* terkait pembahasan apa yang menjadi alasan dan daftar pertimbangan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

3. Struktur Tematik

Berdasarkan struktur tematik, artikel ini menjelaskan terkait daftar pertimbangan serta alasan yang mendasari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. Paragraf 1 – 6 menjelaskan terkait alasan dibalik Perppu Cipta Kerja dan kondisi apa yang terpenuhi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Kemudian, paragraf 7 – 21 menjelaskan terkait daftar yang menjadi pertimbangan atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

4. Struktur Retoris

- Artikel ini melampirkan foto Presiden Joko Widodo yang digambarkan sedang melakukan pidato dengan penjelasan Presiden Jokowi yang mengklaim bahwa terdapat beberapa kegentingan memaksa untuk mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Terdapat kata “ketidakpastian” dan “kegentingan” yang menekankan alasan dari terbitnya aturan yang diterbitkan. Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai oleh penulis guna menjelaskan terkait alasan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja serta daftar pertimbangan yang menjadi landasan utama atas terbitnya kebijakan tersebut.

F. Analisis Artikel Berita 6 CNNIndonesia.com

Judul : Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal – akalank Jokowi

Sumber : CNNIndonesia.com

Tanggal : 4 Januari 2023

Ringkasan : Beberapa pihak seperti pakar hukum dan pengamat politik berpendapat bahwa diterbitkannya Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo hanyalah sebuah justifikasi sebagai langkah untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya memperbaiki UU

Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat, bukan karena adanya kegentingan yang memaksa atau alasan lainnya seperti perang antara Rusia dengan Ukraina.

Tabel 4. 12 Analisis Artikel Berita 12 CNNIndonesia.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal – akalank Jokowi.
	Lead	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pengujung 2022.
	Latar Informasi	Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dengan alasan kegentingan memaksa dinilai hanya sebuah justifikasi untuk menghindari tanggung jawab perbaikan UU Cipta Kerja oleh beberapa pengamat politik dan pakar hukum.
	Kutipan Sumber	<p>Jamiluddin Ritonga (Pengamat Politik)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Kan pemerintah mengakui bahwa perekonomian Indonesia baik, yang kedua industri berjalan baik, para pekerja bekerja dengan baik, jadi apa yang terkait kegentingan, kan tidak ada," 2. "Ya pembenaran ya, jadi justifikasi pemerintah. Tidak ada situasi yang bisa dibenarkan oleh pemerintah untuk menyatakan negeri ini sedang dalam situasi genting," <p>Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Saya dari sisi teknis, perang Ukraina dan Rusia itu sudah berlangsung cukup lama, artinya kalau sekarang tiba-tiba dijadikan alasan itu, negara tidak antisipatif selama ini, kan sudah cukup lama, kan sudah hampir setahun sebenarnya perang itu, nah artinya kalau dianggap sekarang tiba-tiba keadaan memaksaya negara tidak antisipasi," 2. "Ini bukan soal kegentingan memaksa sehingga harus dikeluarkan Perppu, ini cara pemerintah saja untuk menghindari tanggung jawab untuk memperbaiki undang-undang itu, jadi dia ambil jalan pintas dengan bikin aturan yang terabasan," 3. "Isinya hakim MK bisa dievaluasi di tengah jalan dan bisa menjadi alasan untuk diberhentikan, jadi saya kira bukan terasa sekadar asa kosong saya rasa omong kosong. Asa kosong di DPR, sedangkan di MK kemungkinan besar menjadi omong kosong," <p>Hendri Satrio (Pengamat Politik)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. "Kalau menurut saya ini akan menjadi torehan catatan cacat sejarah buat pemerintah Pak Jokowi kalau kemudian proses ini tidak dibenerin," 2. "Secara politik ini tidak bagus, karena dilihat bahwa pemerintah nampaknya ingin mengambil jalan pintas dengan tidak mengindahkan perintah MK dan mau-maunya sendiri," 3. "Kan presiden bukan raja, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, bukan hanya tentang subjektivitas tapi juga tentang kepatutan sebagai negarawan," 4. "Kan presiden harusnya bersandar dengan kepatutan itu, patut enggak ini buat Indonesia, patut enggak buat negara ini, patut enggak buat bangsa ini. Jadi bukan hanya soal boleh tidak boleh, bisa tidak bisa," 5. "Kalau ditanya ada kepentingan, ya ada, dipaksakan kok, sudah inkonstitusional bersyarat kemudian dimunculin perppu, kan dipaksain,"
		Joko Widodo (Presiden RI)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. "Tapi semua bisa kita jelaskan,"
	Pernyataan Opini	Tidak ada pernyataan opini dalam artikel.
	Penutup	Artikel ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi yang menjawab terkait kritik – kritik yang disampaikan: "Tapi semua bisa kita jelaskan,"
Struktur Skrip	What	Alasan yang diberikan oleh pemerintah terkait terbitnya Perppu Cipta Kerja dinilai sekedar pembenaran semata.
	Where	Pasar Tanah Abang, Blok A.
	When	2 Januari 2022.
	Who	Joko Widodo, Hendri Satrio, Zainal Arifin Mochtar, Jamiluddin Ritonga.
	Why	Pemerintah dinilai hanya melakukan justifikasi untuk menghindari tanggung jawab perbaikan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
	How	Pakar hukum dan pengamat politik melontarkan kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi kalimat, hubungan antar kalimat.	Artikel ini menjelaskan tentang kritik – kritik yang disampaikan oleh pakar hukum dan pengamat politik terkait pandangan mereka soal alasan dibalik penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pada paragraf 1 – 4 dijelaskan mengenai alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Paragraf 5 – 26 berisikan tentang kritik – kritik yang disampaikan oleh pengamat politik dan pakar hukum. Selanjutnya, paragraf 27 – 28 berisi penjelasan oleh Presiden Joko Widodo terkait alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Grafik.	Artikel ini dua foto. Foto pertama ialah sosok Presiden Jokowi yang digambarkan sedang melakukan konferensi dengan penjelasan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja

guna menjawab putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Foto kedua ialah suasana sidang rapat MK dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi maupun DPR dianggap tidak bisa diharapkan untuk membatalkan Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

Terdapat kata “cacat sejarah” pada kalimat “cacat sejarah pemerintahan Jokowi” yang menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja adalah kebijakan yang menodai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Rincian Analisis

1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis dalam artikel, penulis ingin menginformasikan terkait adanya kritik yang datang dari beberapa pengamat politik dan pakar hukum yang menilai bahwa Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi dengan alasan kegentingan yang memaksa hanya sebuah pembenaran atau justifikasi guna menghindari proses panjang memperbaiki UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Artikel yang diberi judul “Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal – akalan Jokowi” oleh penulis menegaskan bahwa alasan kegentingan memaksa hanya sebatas alasan yang dibuat – buat oleh Presiden Joko Widodo. *Lead* dan latar informasi pada artikel memiliki penjelasan yang tidak berbanding lurus dengan judul dimana ketiganya menjelaskan tentang perihal yang berbeda. Kutipan sumber pada artikel memberikan penjelasan terkait bagaimana pihak – pihak yang melontarkan kritik menyampaikan pemikirannya atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Melalui struktur sintaksis, penulis disini ingin menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi ialah sesuatu yang melanggar konstitusi dengan alasan yang dibuat – buat.

2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, kaidah 5W+1H disini terpenuhi secara lengkap. Artikel ini terfokus pada unsur *how* dimana menjelaskan terkait bagaimana

respon dari beberapa pengamat politik dan pakar hukum menanggapi terbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

3. **Struktur Tematik**

Berdasarkan struktur tematik, secara menyeluruh artikel ini menjelaskan tentang kritik – kritik yang disampaikan oleh pakar hukum dan pengamat politik terkait pandangan mereka soal alasan dibalik penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pada paragraf 1 – 4 dijelaskan mengenai alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Paragraf 5 – 26 berisikan tentang kritik – kritik yang disampaikan oleh pengamat politik dan pakar hukum. Selanjutnya, paragraf 27 – 28 berisi penjelasan oleh Presiden Joko Widodo terkait alasan terbitnya Perppu Cipta Kerja.

4. **Struktur Retoris**

Penulis dalam artikel ini melampirkan dua foto. Foto pertama ialah sosok Presiden Jokowi yang digambarkan sedang melakukan konferensi dengan penjelasan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja guna menjawab putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Foto kedua ialah suasana sidang rapat MK dengan penjelasan Mahkamah Konstitusi maupun DPR dianggap tidak bisa diharapkan untuk membatalkan Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Penulis disini ingin mengabarkan adanya pro dan kontra yang terjadi antara pihak Presiden Joko Widodo dengan Mahkamah Konstitusi terkait Perppu Cipta Kerja. Adapun Terdapat kata “cacat sejarah” pada kalimat “cacat sejarah pemerintahan Jokowi” yang menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja adalah kebijakan yang menodai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan analisis *framing*; artikel ini dibingkai oleh penulis untuk menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah melanggar hukum dan sekedar justifikasi untuk menghindari proses perbaikan yang panjang pada UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.

4.3 Hasil Analisis *Framing* Pemberitaan dalam Portal Detik.com dan CNNIndonesia.com

Berdasarkan hasil rangkuman yang dilakukan pada portal Detik.com secara keseluruhan artikel, terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam pemberitaan terkait Presiden Joko Widodo dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 pada periode Desember 2022 – Januari 2023. Pada Detik.com, peneliti menemukan bahwa Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 digambarkan sebagai figur yang memiliki alasan dan dasar kepentingan yang kuat untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian global yang dapat mengancam perekonomian Indonesia. Hal itu terlepas dari adanya kritik dan pro – kontra yang terjadi, serta pihak – pihak yang menilai Presiden Joko Widodo sebagai seseorang yang melanggar konstitusi. Hal ini terlihat jelas dari keseluruhan berita yang di analisis menyatakan perihal tersebut.

Struktur sintaksis Detik.com menjelaskan secara detail terkait informasi utama yang ingin disampaikan seperti proses diterbitkannya kebijakan oleh Presiden Joko Widodo, alasan yang mendasari kebijakan, hingga bagaimana respon terhadap pro dan kontra yang terjadi. Adapun hal tersebut diperkuat dengan menghadirkan pernyataan dari narasumber yang dikutip ke dalam artikel berita. Narasumber pada berita cenderung berjumlah dua atau lebih, dimana setidaknya satu narasumber dimuat sebagai pihak utama terkait kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, judul artikel yang dibuat oleh pihak Detik.com cenderung lebih informatif dan menggunakan dua kalimat. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari artikel yang berjudul “*Jokowi Respons Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja: Semua Bisa Dijelaskan*” yang menjelaskan terkait bagaimana Presiden Joko Widodo merespon adanya pro dan kontra yang terjadi atas diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. *Lead* yang diberikan juga mudah untuk dipahami serta menjelaskan informasi utama dan melengkapi judul artikel berita. Artikel pada Detik.com juga cenderung ditutup dengan kutipan dari narasumber yang menegaskan informasi pada artikel.

Pada struktur skrip Detik.com, terdapat satu berita yang tidak memuat unsur *where* pada artikel yang berjudul “*9 Pertimbangan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta*

Kerja”. Detik.com cenderung lebih fokus pada unsur *why* untuk menjabarkan mengapa Presiden Joko Widodo harus menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Kemudian pada unsur tematik, Detik.com terfokus pada alasan, upaya apa yang dilakukan pemerintah, serta langkah – langkah pemerintah dalam menangani adanya pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat.

Pada struktur retorik Detik.com, keseluruhan visual yang dimuat dalam artikel berbentuk video yang disesuaikan dengan isi artikel seperti pernyataan dari Presiden Joko Widodo maupun menteri kabinetnya seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menko Polhukam terkait kebijakan yang diterbitkan untuk mempertegas informasi yang disampaikan dalam artikel. Adapun pemilihan kata penulis dari Detik.com cenderung awas dalam menekankan sisi permasalahan yang terjadi pada proses dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya pada CNNIndonesia.com, peneliti disini menemukan bahwa sosok Presiden Joko Widodo digambarkan sebagai seseorang yang berdalih dan dianggap sebagai orang yang telah membangkang konstitusi dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 dalam pemberitaan yang dilakukan pada periode Desember 2022 – Januari 2023.

Pada struktur sintaksis, CNNIndonesia.com menjelaskan informasi terkait bagaimana Presiden Joko Widodo merespon terhadap pro – kontra, alasan penerbitan, pertimbangan – pertimbangan yang mendasari Perppu, serta bagaimana respon maupun kritik dari pihak masyarakat lainnya. Hal ini diperkuat dengan judul, *lead* berita, serta kutipan sumber yang disertakan dalam artikel. Judul secara keseluruhan cenderung dibuat lugas dan memuat satu kalimat oleh penulis. Seperti contoh yakni: “*Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal – akalan Jokowi*”.

Lead pada artikel CNNIndonesia.com cenderung memberikan informasi yang serupa dengan judul. Kemudian pada kutipan sumber, narasumber yang dimuat dalam artikel cenderung berjumlah tiga sampai empat narasumber yang berasal dari pihak – pihak yang kontra dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja maupun pihak kabinet Presiden Joko Widodo untuk mempertegas informasi dalam artikel. Adapun masih dapat ditemukan adanya opini pada artikel yang berjudul “*Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing*” pada

paragraf dua artikel yang berbunyi: “Salah satu dalih yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk menerbitkan Perppu itu--alih-alih merevisi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setahun lalu-- adalah kondisi dunia karena perang Rusia-Ukraina”.

Pada struktur skrip dari keseluruhan berita CNNIndonesia.com, masih ditemukan adanya kaidah 5W+1H yang tidak lengkap dimana tepatnya pada unsur *where* yang tidak memberikan keterangan dimana pihak – pihak tertentu memberikan keterangan kepada pers maupun keterangan latar tempat lainnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui artikel yang berjudul “*Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi Terbitkan*” dan “*Daftar Kegentingan Memaksa yang Bikin Jokowi Terbitkan Perppu*”. CNNIndonesia.com cenderung terfokus pada unsur *why* dalam mempertegas alasan penerbitan Perppu oleh Presiden Joko Widodo dan mengapa hal tersebut memantik pro – kontra maupun kritik di kalangan masyarakat. Adapun dalam struktur tematik, CNNIndonesia.com menulis artikel dengan memfokuskan pada penjelasan mendetil terkait terjadinya pro – kontra semenjak diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, pertimbangan kebijakan, tanggapan – tanggapan pihak tertentu atas diterbitnya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

Keseluruhan artikel berita CNNIndonesia.com pada struktur retorik dalam pemilihan gambar berkaitan dan bertujuan untuk menguatkan pesan yang ada dalam artikel. Gambar – gambar yang dimuat oleh CNNIndonesia.com cenderung menampilkan sosok Presiden Joko Widodo seorang dan diberikan keterangan singkat untuk mempertegas informasi yang disajikan dalam artikel berita. Kemudian pemilihan kata cenderung tegas untuk memperjelas alasan, perbedaan pendapat, serta bagaimana Presiden Joko Widodo digambarkan oleh pihak – pihak tertentu pada pro – kontra yang terjadi atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Tujuan utama dari dilakukannya analisis ini ialah melihat bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh Detik.com dan CNNIndonesia.com pada periode Desember 2022 – Januari 2023 membingkai Presiden Joko Widodo yang memiliki peran besar dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti menemukan adanya perbedaan dari kedua media tentang bagaimana mereka mengemas atau membingkai sosok

Presiden Joko Widodo melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 4. 13 Perbandingan Pembingkai Sosok Presiden Joko Widodo dalam berita penerbitan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com periode Desember 2022 – Januari 2023

Perangkat Framing	Detik.com	CNNIndonesia.com
Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"> Judul berita cenderung lebih informatif dan menggunakan dua kalimat. <i>Lead</i> yang dimuat pada artikel cenderung menjelaskan informasi utama dalam artikel dan melengkapi informasi pada judul. Narasumber yang dimuat pada artikel cenderung berjumlah dua atau lebih. Artikel tidak memuat opini dari wartawan. Artikel cenderung ditutup dengan kutipan dari narasumber yang menegaskan informasi pada artikel. 	<ul style="list-style-type: none"> Judul berita cenderung lebih lugas dan menggunakan satu kalimat. <i>Lead</i> yang dimuat pada artikel cenderung memiliki informasi yang serupa dengan judul artikel. Narasumber yang dimuat pada artikel cenderung berjumlah tiga sampai empat narasumber. Terdapat artikel yang masih memuat opini dari wartawan. Artikel cenderung ditutup dengan kutipan dari narasumber yang menegaskan informasi pada artikel.
Skrip	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat satu artikel yang tidak memuat unsur <i>where</i> dan secara keseluruhan cenderung menonjolkan unsur <i>why</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dua artikel yang tidak memuat unsur <i>where</i> dan secara keseluruhan cenderung menonjolkan unsur <i>why</i>.
Tematik	<ul style="list-style-type: none"> Artikel cenderung terfokus pada alasan, upaya apa yang dilakukan pemerintah, serta bagaimana pemerintah dalam menanggapi adanya pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Artikel cenderung ditulis dengan memfokuskan pada pro – kontra yang terjadi secara detil, pertimbangan kebijakan, serta tanggapan – tanggapan pihak tertentu atas diterbitnya Perppu Cipta Kerja.
Retoris	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan visual yang dimuat cenderung berbentuk video yang disesuaikan dengan isi artikel. Pemilihan kata yang digunakan cenderung awas dalam menekankan sisi permasalahan yang terjadi pada proses dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan visual yang dimuat cenderung berbentuk gambar yang dimuat sesuai dengan judul yang diberikan. Gambar cenderung diberikan keterangan sebagai penegas. Pemilihan kata cenderung tegas untuk memperjelas alasan, perbedaan pendapat, serta bagaimana Presiden Joko Widodo digambarkan oleh pihak – pihak tertentu pada pro – kontra yang terjadi atas terbitnya Perppu Cipta Kerja.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

Berdasarkan isi beritanya, terdapat perbedaan dari pemberitaan Detik.com dan CNNIndonesia.com tentang penggambaran Presiden Joko Widodo dalam

Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pada periode Desember 2022 hingga Januari 2023. Pada Detik.com, Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 digambarkan sebagai figur atau sosok yang memiliki dasar – dasar yang kuat serta alasan kepentingan yang jelas bahwa terdapat ancaman ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Terlepas dari adanya pro – kontra, kritik, dan penilaian negatif, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara tetap menerbitkan Perppu Cipta Kerja untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai bentuk antisipasi krisis ekonomi.

Untuk CNNIndonesia.com menilai Presiden Joko Widodo dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 sebagai oknum yang memberikan justifikasi atau berdalih, dan melanggar prinsip konstitusi. CNNIndonesia.com cenderung memfokuskan berita pada pro – kontra yang terjadi serta tanggapan – tanggapan pihak tertentu terhadap Presiden Joko Widodo yang kontroversial. Keluarnya Perppu Cipta Kerja nomor 2 Tahun 2022 membuat Presiden Joko Widodo dicap sebagai pemimpin yang mengambil jalan pintas dan memberikan dampak negatif dalam sejarah masa pemerintahannya. Kritik tersebut bermula dari kegagalannya mengamandemen UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang ditetapkan inkonstitusional.

Perbedaan menonjol dapat terlihat melalui struktur sintaksis dari artikel kedua media Detik.com dan CNNIndonesia.com. Judul yang dimuat oleh Detik.com cenderung lebih informatif dengan menggunakan dua kalimat, sedangkan CNNIndonesia.com cenderung lebih lugas dan menggunakan satu kalimat. Kemudian, narasumber yang dimuatkan oleh CNNIndonesia.com pada artikelnya cenderung berjumlah tiga sampai empat narasumber untuk menekankan terjadinya pro – kontra. Sedangkan Detik.com sendiri cenderung berjumlah dua atau lebih dengan narasumber pertama sebagai penegas informasi yang disampaikan terkait Perppu Cipta Kerja.

Adapun lead berita yang dimuat Detik.com cenderung menjelaskan informasi secara lengkap, sedangkan CNNIndonesia.com memiliki lead yang memiliki informasi yang serupa dengan judul dan menegaskan terkait akar permasalahan dari sebuah pro – kontra yang terjadi. Selain itu, perbedaan lain terlihat pada konten opini CNNIndonesia yang dimana tulisan tersebut

mengisyaratkan penerbitan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo alih – alih seperti revisi putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu dapat ditinjau pada kalimat “alih-alih merevisi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setahun lalu,” pada artikel yang berjudul “Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing”.

Meninjau struktur skrip, masih ditemukan artikel pada Detik.com dan CNNIndonesia.com yang masih belum memenuhi kaidah 5W+1H dan keduanya cenderung menekankan unsur why dalam artikel yang dipublikasikan. Kemudian pada struktur retorik, kata – kata yang digunakan dalam artikel berita yang di publikasikan oleh CNNIndonesia.com cenderung memperjelas alasan, perbedaan pendapat, serta bagaimana Presiden Joko Widodo digambarkan oleh pihak – pihak tertentu atas pro – kontra yang terjadi dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Detik.com sendiri cenderung awas dalam menekankan sisi permasalahan yang terjadi pada proses dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pemilihan visual juga menjadi salah satu hal yang mencolok, dimana Detik.com cenderung berbentuk video yang disesuaikan dengan isi artikel, dan CNNIndonesia.com cenderung berbentuk gambar yang dimuat sesuai dengan judul yang juga diberikan penjelasan sebagai penegas.

4.4 Diskusi Teoritik

Penggambaran Presiden Joko Widodo dalam pemberitaan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 di Detik.com dan CNNIndonesia.com periode Desember 2022 – Januari 2023 menunjukkan pendekatan yang berbeda jika dianalisis melalui perangkat framing Pan dan Kosicki. Bagaimana kedua media tersebut secara strategis menekankan unsur-unsur tertentu dalam menggambarkan Presiden Joko Widodo dalam pemberitaan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 terlihat jelas melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Media mementingkan suatu isu dibandingkan isu lainnya dalam proses pemilihan berita dengan caranya masing – masing untuk dijadikan sebagai agenda dalam pemberitaan (Nugroho, 2014:32). Sebagaimana Detik.com menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang memiliki alasan kepentingan yang kuat dalam menerbitkan Perppu dan juga merupakan bentuk antisipasi yang genting

dari ancaman ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo juga digambarkan Detik.com sebagai figur yang dapat memberikan solusi untuk mengisi kekosongan hukum negara terlepas dari adanya pro – kontra, kritik, dan penilaian negatif dari beberapa kalangan masyarakat dengan menerbitkan aturan tersebut. Sementara CNNIndonesia.com menggambarkan sosok Presiden Joko Widodo sebagai seseorang yang berdalih, dan membangkang konstitusi dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Fokus berita CNNIndonesia.com cenderung menitik beratkan pada pro – kontra yang terjadi dan tanggapan – tanggapan pihak tertentu terhadap Presiden Joko Widodo yang kontroversial.

Lembaga media massa pada umumnya memiliki kepribadian dan editorial masing – masing, melahirkan politik media massa dan diturunkan menjadi politik redaksi atau kebijaksanaan redaksi, dimana dapat menentukan agenda politik media yang dapat menguntungkan atau justru merugikan sosok politikus tertentu (Amanda, 2014). Hal ini berkesinambungan dengan bagaimana perbedaan pemberitaan yang dilakukan oleh Detik.com dan CNNIndonesia.com terhadap penggambaran sosok Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022.

Detik.com dan CNNIndonesia.com memiliki kekuatan untuk menyebarluaskan informasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan persuasi kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan konsep kepemilikan media, dijelaskan bahwa pada era ini kepemilikan media menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan dan dapat dijadikan sebagai instrumen guna membentuk opini publik (Prasetya, 2013:233). Terlepas dari fakta bahwa portal media online Detik.com dan CNNIndonesia.com berada dibawah satu naungan, dalam memberitakan sosok Presiden Joko Widodo pada berita Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 keduanya memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda. Hal itu salah satunya terlihat dari bagaimana Detik.com dan CNNIndonesia.com menghadirkan narasumber dalam berita. Jumlah narasumber yang disertakan pada berita Detik.com cenderung berjumlah dua atau lebih, sedangkan CNNIndonesia.com cenderung berjumlah tiga sampai empat narasumber untuk menekankan pada variasi pandangan dari pihak – pihak yang kontra soal Perppu. Adapun hal lainnya terlihat dari adanya pemaparan

opini dari salah satu artikel CNNIndonesia.com yang berjudul “Perppu Ciptaker Jokowi Gugurkan Putusan MK Jadi Sorotan Media Asing” pada paragraf dua artikel yang berbunyi: “Salah satu dalih yang digunakan pemerintahan Jokowi untuk menerbitkan Perppu itu--alih-alih merevisi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setahun lalu-- adalah kondisi dunia karena perang Rusia-Ukraina”.

Dalam proses mengkonstruksi realitas sosial, penggambaran yang diciptakan oleh media massa berpotensi untuk disebarluaskan secara luas dan seragam. Realitas yang dikonstruksi ini, pada gilirannya, mempengaruhi opini publik dan memvalidasi realitas yang dibentuk oleh media (Egan, 2016:19). Merujuk pada hal tersebut, Detik.com dan CNNIndonesia.com memiliki peran penting untuk mempengaruhi interpretasi masyarakat yang juga dapat menciptakan realitas sesuai dengan latar belakang dan agendanya masing – masing. Detik.com dan CNNIndonesia memaparkan peran Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 periode Desember 2022 – Januari 2023 dengan cara yang khas. Variasi tersebut terlihat pada pilihan kata yang digunakan dalam isi dan judul artikel, yang menonjolkan kontras di antara keduanya seperti: “Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Perang Ukraina Disinggung” milik Detik.com dan “Perang Rusia-Ukraina Jadi Dalih Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja” milik CNNIndonesia.com. Kedua berita tersebut memiliki skop yang sama, hanya saja terdapat penggunaan kata “dalih” yang menekankan bahwa perang Rusia – Ukraina hanya alasan yang dibuat – buat Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja sehingga membentuk konstruksi realitas yang berbeda.

Detik.com dan CNNIndonesia.com memberikan informasi mengenai terbitnya Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan kejadian faktual di lapangan. Pemberitaan tersebut didukung oleh sumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Perppu, serta masukan dari para ahli di berbagai bidang, seperti pakar hukum atau pengamat politik. Hal ini sesuai dengan pemaparan teori komunikasi massa dimana pesan yang disampaikan bersifat umum dan berupa fakta, opini, maupun peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat luas serta memiliki sifat yang penting (Romli, 2017:4-5).

Berdasarkan konsep berita online, Detik.com dan CNNIndonesia.com juga memberitakan peristiwa mengenai kebijakan pemerintah dengan saluran publikasinya yakni media online dengan mengedepankan akurasi dan juga kepercayaan (Cahyanda, 2016:27). Adapun Detik.com dan CNNIndonesia.com memenuhi prinsip jurnalisme online yang pada dasarnya menyebarkan informasi melalui media internet dimana salah satu wadah utamanya ialah website (Romli, 2018:15 – 16).

Kendati demikian, artikel – artikel yang disajikan oleh Detik.com dan CNNIndonesia.com masih belum sepenuhnya memenuhi kaidah 5W+1H. Tidak ditemukannya unsur where terlihat pada artikel Detik.com yang berjudul “9 Pertimbangan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja”, serta CNNIndonesia.com pada dua artikel yang berjudul “Penggugat UU Ciptaker: Jokowi Membangkang Konstitusi Terbitkan Perppu” dan “Daftar Kegentingan Memaksa yang Bikin Jokowi Terbitkan Perppu”. Sebagai produk jurnalistik, berita sebaiknya dapat memenuhi atau menjawab unsur dari 5W + 1H agar pemaparannya faktual (Pambudi, 2019:19-20).